

Implementation of the Family Support Team Program in Realizing Independent Villages Case Study: Jambangan Village, Candi District, Sidoarjo Regency

[Implementasi Program Tim Pendamping Keluarga Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Studi Kasus : Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo]

Della Rahmawati¹⁾, Isna Fitria Agustina²⁾

¹⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: isnaagustina@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of the Family Assistance Team (TPK) program in realizing an independent village in Jambangan Village, Candi District, Sidoarjo Regency. This research uses a qualitative method with a descriptive approach through observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive model. The results show that the implementation of the TPK program has been running quite well based on Edward III's indicators, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Communication is carried out directly through home visits, making information easily understood by the community. Resources are considered adequate, although there are still technical constraints in digital reporting. The disposition of implementers shows a friendly, responsible, and highly committed attitude. The bureaucratic structure is well organized through clear task distribution and systematic standard operating procedures. However, optimization of technology and reporting systems still needs improvement to ensure the program runs more effectively and sustainably.*

Keywords – *Implementation; Family Support Team; Independent Village; Stunting*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Jambangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program TPK telah berjalan cukup baik dilihat dari empat indikator Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Aspek komunikasi dilakukan secara langsung melalui kunjungan rumah sehingga informasi mudah dipahami masyarakat. Sumber daya dinilai cukup memadai, meskipun masih terdapat kendala teknis pada pelaporan digital. Disposisi pelaksana menunjukkan sikap yang ramah, bertanggung jawab, dan berkomitmen tinggi. Struktur birokrasi telah tersusun jelas melalui pembagian tugas dan SOP yang sistematis. Namun demikian, optimalisasi teknologi dan sistem pelaporan masih perlu ditingkatkan agar program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.*

Kata Kunci – *Implementasi; Tim Pendamping Keluarga; Desa Mandiri; Stunting*

I. PENDAHULUAN

Desa Mandiri adalah konsep pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan potensi lokal dan peningkatan kemampuan masyarakat. Desa yang mandiri tidak semata-mata bergantung pada bantuan pemerintah pusat maupun daerah, melainkan mampu mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduknya secara berkelanjutan[1]. Salah satu program strategis yang dilaksanakan untuk mewujudkan desa mandiri adalah Program Tim Pendamping Keluarga (TPK). Tim ini terdiri dari tenaga profesional yang dibentuk dengan melibatkan bidan, kader TP PKK, serta kader KB. Tugas utama TPK adalah memberikan pendampingan berupa edukasi, rujukan, serta memfasilitasi akses terhadap program bantuan sosial bagi calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu nifas, anak berusia 0 hingga 59 bulan, dan keluarga yang berisiko mengalami stunting. Melalui pendampingan ini, keluarga diharapkan mampu mengenali faktor risiko stunting sejak dini. Komposisi tim dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan, misalnya dengan bekerja sama dengan bidan dari desa atau kabupaten lain, atau melibatkan perawat maupun tenaga kesehatan profesional lainnya [2].

Pemerintah telah membentuk tim pendamping keluarga dengan fokus pada keluarga berisiko stunting, sesuai dengan Surat Kepala BKKBN Nomor 1053/BL 02/G3/2021 Tanggal 6 Agustus, Perihal Tim Pendamping Keluarga Memastikan Pembentukan Tim Pendamping Keluarga di seluruh desa di kabupaten dan Implementasi Tim Pendamping Keluarga di tingkat desa diharapkan dapat memperkuat struktur sosial, meningkatkan keterlibatan warga, dan mendorong inisiatif lokal menuju desa mandiri. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting memiliki sejumlah tujuan strategis, antara lain menurunkan angka prevalensi stunting, meningkatkan kesiapan dalam kehidupan berkeluarga, memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi, memperbaiki pola pengasuhan anak, meningkatkan akses serta mutu layanan kesehatan, dan memperluas akses terhadap air minum serta sanitasi yang layak. Seluruh tujuan tersebut diarahkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan [3].

Tim Pendamping Keluarga memberikan pengaruh positif bagi masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu yang memerlukan perhatian lebih. Kehadiran tim ini membantu keluarga menghadapi berbagai tantangan kehidupan dengan lebih efektif, meningkatkan taraf hidup, serta memperlancar keharmonisan dalam keluarga. Upaya pencegahan terhadap permasalahan sosial seperti gizi buruk, anak putus sekolah, dan ketimpangan akses layanan kesehatan menjadi salah satu manfaat penting dari program ini. Selain itu, keluarga yang mendapatkan pendampingan dari tim tersebut cenderung lebih siap menghadapi berbagai kesulitan, sehingga turut memperkuat ketahanan keluarga maupun masyarakat secara keseluruhan [18]. Salah satu langkah dukungan pemerintah adalah menyelenggarakan kursus pelatihan atau seminar. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat kapasitas para kader agar dapat membantu keluarga di wilayah mereka mencegah stunting melalui gaya hidup sehat dan gizi yang baik. Para kader diharapkan dapat menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh untuk memberikan dampak positif yang signifikan bagi keluarga yang mereka bantu. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kader TPK lebih siap dan dapat memberikan dukungan optimal bagi keluarga yang berisiko mengalami stunting [4].

Desa Jambangan merupakan salah satu desa di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang menjalankan Program Tim Pendamping Keluarga (TPK). Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jambangan No 14 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari 12 orang yang terbagi menjadi 4 tim. Pelaksanaan Program Tim Pendamping keluarga di Desa Jambangan, berfokus pada pendampingan dan pemantauan sasaran keluarga yang terdiri dari calon pengantin, ibu hamil, pascapersalinan, dan balita (baduta). Setiap bulan, tim pendamping keluarga melakukan kunjungan satu hari. Tim menghubungi sasaran terlebih dahulu untuk memastikan kesiapan kunjungan. Pada kunjungan semisal sasarannya adalah calon pengantin, tim memastikan koordinasi administrasi pernikahan, pemberian vaksin TT, serta kesiapan mental calon pengantin. Tim juga memberikan saran terkait gizi dan kesehatan sebagai persiapan masa kehamilan. Dengan adanya program tim pendamping keluarga sasaran menyambut baik dan merasa terbantu dengan pendampingan ini.

Berikut tabel data sasaran calon pengantin, ibu hamil, pascapersalinan, dan balita (baduta) yang sudah dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga Desa Jambangan dari tahun 2024 – 2025.

Tabel 1. Data sasaran calon pengantin, ibu hamil, pasca persalinan, dan bayi dua tahun (baduta) Tahun 2024-2025

No	Kategori Sasaran	2024	2025
1	Calon Pengantin	5	20
2	Ibu Hamil	16	19
3	Pasca persalinan	12	11
4	Baduta	36	44
	Total	69	94

Sumber : Diolah Penulis berdasarkan Sistem Informasi Data Keluarga BKKBN Desa Jambangan

Pada tahun 2024, jumlah sasaran calon pengantin sebanyak 5 orang, ibu hamil 16 orang, ibu pascapersalinan 12 orang, dan baduta 36 anak. Sementara itu, pada tahun 2025, jumlah sasaran mengalami peningkatan pada beberapa kategori. Calon pengantin meningkat menjadi 20 orang, ibu hamil bertambah menjadi 19 orang, sedangkan kategori ibu pascapersalinan mengalami sedikit penurunan menjadi 11 orang. Adapun kategori baduta juga mengalami peningkatan dari 36 menjadi 44 anak. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah sasaran pendampingan keluarga pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, terutama pada kategori calon pengantin, ibu hamil, dan baduta. Kondisi ini menggambarkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendampingan keluarga, sekaligus menunjukkan perluasan cakupan serta optimalisasi pelaksanaan program TPK di Desa Jambangan.

Dalam pelaksanaan Program Tim Pendamping Keluarga di Desa Jambangan masih belum maksimal karena memiliki tantangan dalam penerapannya. Pertama, fasilitas seperti jaringan internet, perangkat, dan aplikasi misalnya Elsimil sering mengalami kendala teknis atau *error*. Kedua, Perubahan sistem pelaporan manual ke digital membuat kader kesulitan dan sering terjadi data ganda atau keterlambatan input. Ketiga, keterbatasan dalam sumber daya manusia pada tim pendamping keluarga, khususnya terkait penggunaan aplikasi elsimil untuk pelaporan data atau aktivitas program karena ada beberapa kader tim pendamping keluarga yang kesulitan ketika pelaporan menggunakan aplikasi elsimil jadi untuk pelaporan hasil masih menggunakan manual. Aplikasi ELSIMIL (Elektronik Siap Menikah dan Siap Hamil) merupakan aplikasi screening pendampingan dan pencegahan bagi pasangan yang berencana menikah tingkat provinsi yang bertujuan untuk mengatasi stunting. Aplikasi ini menghubungkan pasangan yang berencana menikah dengan tenaga kesehatan, berfungsi sebagai alat screening untuk mengidentifikasi resiko, serta menyediakan sumber daya pendidikan tentang cara mempersiapkan diri untuk pernikahan dan kehamilan, terutama terkait faktor risiko stunting [9].

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji Implementasi Program Tim Pendamping Keluarga Dalam Membangun Desa Mandiri Di Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Peneliti akan fokus pada indikator implementasi kebijakan berdasarkan model Edward III. Teori Implementasi sebagaimana yang disampaikan oleh George Edward III ada empat indikator dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (*Communications*) yaitu menunjukkan bahwa suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan sukses jika terdapat komunikasi yang efektif antara pelaksana program (kebijakan) dan kelompok sasaran, Sumber Daya (*Resources*) yaitu setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya keuangan dan manusia yang memadai, Disposisi (*Dispositions*) yaitu merupakan karakteristik yang erat terkait dengan pelaksana program. Integritas, dedikasi, dan demokrasi merupakan sifat-sifat penting dari pelaksana kebijakan. Dan Struktur Birokrasi (*Bureaucratic structure*) yaitu bahwa implementasi kebijakan bergantung pada organisasi birokrasi, aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana itu sendiri [5].

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rezka Zahra Humairah, dkk (2024) berjudul Implementasi Program Tim Pendamping Keluarga (TPK) Di Desa Sinjar Bulan Kecamatan Gumay Ulu Lahat Sumatera Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan case study dan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program TPK telah berhasil dilaksanakan di masyarakat Sinjar Bulan. Hal ini dibuktikan dengan berbagai langkah yang telah diambil, termasuk menjangkau populasi sasaran, menyediakan sumber daya edukasi, memiliki proses rujukan pasien yang jelas, dan memiliki sistem penanganan kasus stunting. Namun, pelaksanaan program TPK mungkin terhambat oleh beberapa hal, seperti staf yang terkadang mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus, politik keluarga di desa, kemampuan pelaporan yang kurang memadai, dan seringnya gangguan koneksi internet [6].

Kedua, Penelitian yang dilakukan Aulia Rahma, dkk (2025) yang berjudul Implementasi Program TPK (Tim Pendamping Keluarga) Dalam Pendampingan Calon Pengantin dan Ibu Hamil di Desa Telaga Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Metode penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Program sosialisasi dan edukasi terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin dan ibu hamil mengenai pentingnya kesehatan reproduksi, pemenuhan gizi, serta upaya pencegahan stunting. Kegiatan ini dilaksanakan melalui berbagai metode, seperti kunjungan rumah, pertemuan kelompok, dan pendampingan personal. Pelibatan keluarga, kader posyandu, dan unsur masyarakat secara aktif turut memperkuat dukungan komunitas terhadap pencapaian tujuan program. Selain itu, akses ibu hamil terhadap layanan kesehatan mengalami peningkatan, khususnya dalam pemeriksaan kehamilan, imunisasi, dan pemberian vitamin tambahan. Program juga mampu melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi kesehatan ibu hamil, termasuk deteksi risiko anemia, hipertensi, dan kekurangan gizi. Calon pengantin dan ibu hamil dibekali pedoman pola makan bergizi seimbang sebagai langkah pencegahan kekurangan nutrisi yang dapat berujung pada stunting. Secara keseluruhan, program ini mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya persiapan kesehatan sebelum menikah dan selama masa kehamilan. Partisipasi aktif masyarakat, terutama kader, berperan besar dalam memperkuat implementasi program di tingkat lokal. Ke depan, penguatan melalui pelatihan berkelanjutan bagi pendamping keluarga serta perluasan jangkauan program ke seluruh lapisan masyarakat dengan pendekatan pendampingan keluarga menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan dan efektivitas program [2].

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Alif Akbar Nur Cahyo (2025) yang berjudul Implementasi Program Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam Upaya Penurunan Stunting di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Kecamatan Polokarto belum berjalan secara optimal dalam menurunkan angka stunting. Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, indikator komunikasi dan struktur birokrasi telah terpenuhi dengan baik. Namun demikian, indikator sumber daya masih menghadapi kendala, khususnya terkait penggunaan aplikasi Elsimil yang kerap mengalami gangguan teknis sehingga menghambat proses pendampingan. Selain itu, indikator disposisi juga belum terlaksana secara optimal, ditandai dengan masih adanya sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya menerima pendampingan

yang dilakukan oleh TPK. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih empatik dan persuasif kepada masyarakat agar program dapat diterima dan dijalankan secara efektif. Hambatan utama dalam pelaksanaan Program TPK di Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, meliputi sering terjadinya gangguan pada aplikasi Elsimil serta rendahnya tingkat penerimaan masyarakat terhadap program pendampingan [16].

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Implementasi Program Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk membangun desa mandiri di Jambangan, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana faktor-faktor seperti komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana program, dan struktur birokrasi mendukung atau menghambat keberhasilan Implementasi Program Tim Pendamping Keluarga (TPK).

II. METODE

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini terletak di Pemerintah Desa Jambangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini berfokus pada Implementasi Program Tim Pendamping Keluarga Dalam Membangun Desa Mandiri di Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen dan arsip yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive sampling*, yakni mereka yang memiliki pemahaman mendalam terhadap isu penelitian. Informan penelitian terdiri atas Kaur Perencanaan, Kader Tim Pendamping Keluarga dan Masyarakat Penerima Program Tim Pendamping Keluarga. Teknis analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (Sugiyono, 2015), yang mencakup empat tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Tahap pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh berbagai informasi atau fenomena yang berkaitan dengan fokus penelitian di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan menyederhanakan informasi penting agar mewakili keseluruhan temuan. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi teks, serta dilengkapi dengan bagan, deskripsi, atau *flowchart* untuk memperjelas hasil temuan. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan setelah seluruh data disajikan secara sistematis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002:102), Implementasi merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, maupun kelompok, baik dari unsur pemerintah maupun swasta, yang bertujuan untuk merealisasikan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Implementasi dipahami sebagai upaya nyata yang diarahkan pada pencapaian tujuan kebijakan sebagaimana tercantum dalam keputusan resmi. Dalam prosesnya, lembaga atau badan yang menjalankan kebijakan tersebut melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang pada akhirnya memberikan pengaruh atau dampak kepada masyarakat [7]. Berdasarkan hasil pengumpulan data dari observasi peneliti, wawancara, survei literatur, dan sumber-sumber lainnya, peneliti telah melakukan penelitian dengan judul " Implementasi Program Tim Pendamping Keluarga Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Studi Kasus : Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo ". Penelitian tersebut menggunakan teori George C Edward III yang terdiri dari 4 indikator yaitu Komunikasi, Sumber, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Berikut hasil dan pembahasan.

A. Komunikasi

Menurut George C. Edward III dalam Agustino (2017:136), komunikasi memiliki peran krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif apabila para pengambil keputusan memahami dengan jelas tugas dan tanggung jawab mereka. Pemahaman ini hanya dapat terwujud melalui komunikasi yang baik, sehingga setiap pihak yang terlibat mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan. Apabila komunikasi berjalan dengan lancar, maka seluruh keputusan dan peraturan pelaksanaan kebijakan dapat disampaikan secara tepat kepada instansi atau pihak yang berwenang. Selain itu, informasi yang dikomunikasikan perlu disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten agar para pelaksana kebijakan dapat bekerja selaras dan searah dalam mengimplementasikan kebijakan di masyarakat [8]. Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pernyataan dari Ibu Iis Hariati selaku Kaur Perencanaan Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

“Untuk Sosialisasi tpk di desa tidak ada karena tpk dibentuk secara langsung oleh plkb tetapi untuk bimbingan teknis ada di kecamatan terkait program tpk ini jadi perkenalan bagaimana warga tahu bahwa program tpk ini ada ya pada saat kunjungan pertama ini tiap kader tpk kan mau mengunjungi katakanlah baduta tadi akan menghubungi ibunya baduta bahwa ini akan ada pendampingan dari tim tpk untuk badutan tahunya dari situ yang pertama kunjungan ini tim tpk memperkenalkan diri apa sih tpk itu manfaatnya apa dan ini sampai berapa lama

mereka akan melakukan pendampingan dan lain sebagainya seperti itu jadi otodidak langsung” (Wawancara 25 September 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa sosialisasi program Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Desa Jambangan tidak dilakukan secara formal di tingkat desa. Pembentukan TPK dilakukan langsung oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) tanpa adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Meskipun demikian, kegiatan bimbingan teknis (bimtek) bagi kader TPK tetap dilakukan di tingkat kecamatan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai pelaksanaan program. Masyarakat desa pada umumnya baru mengetahui adanya program TPK ketika kader melakukan kunjungan pertama ke rumah sasaran, seperti keluarga dengan baduta (bayi di bawah dua tahun). Pada saat kunjungan tersebut, kader TPK memperkenalkan diri sekaligus menjelaskan tujuan, manfaat, serta bentuk pendampingan yang akan dilakukan. Dengan demikian, proses pengenalan program dilakukan secara langsung dan mandiri (otodidak) melalui pendekatan interpersonal saat kunjungan rumah.

Lalu, Ibu Khusnul Khotimah selaku anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK) Desa Jambangan.

“Iyaa ada sosialisasi dengan kunjungan ke rumah masyarakat dengan cara memperkenalkan diri Assalamualaikum permisi bapak ibu perkenalkan saya kader TPK desa jambangan tujuan saya ke sini untuk pendampingan keluarga yang punya balita, bumil, busui, catin dan remaja ” (Wawancara 10 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa Tim Pendamping Keluarga (TPK) Desa Jambangan melaksanakan sosialisasi program melalui kunjungan langsung ke rumah-rumah warga dengan cara memperkenalkan diri secara sopan dan menjelaskan tujuan kedatangan, yaitu memberikan pendampingan kepada keluarga yang memiliki balita, ibu hamil, ibu menyusui, calon pengantin, dan remaja. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam pelaksanaan program dilakukan secara langsung dan interpersonal agar informasi tersampaikan dengan jelas, membangun kedekatan dengan masyarakat, serta memastikan sasaran program memahami dan menerima kegiatan pendampingan yang dilaksanakan.

Kemudian pernyataan dari saudari Yuhan Adelina (Calon Pengantin) selaku masyarakat penerima program Tim Pendamping Keluarga Desa Jambangan.

“ Sosialisasi program ini dilakukan secara langsung dengan datang ke rumah jadi saya tau nya itu ketika ada kader tpk datang kerumah memberikan pendamping seperti persiapan secara mental dan kesehatan seperti apa sudah melakukan vaksin TT dan biasanya setelah menjelaskan, kader TPK menanyakan lagi apakah saya sudah paham atau belum. Kalau masih bingung, kader biasanya menjelaskan lagi kadang juga diberi contoh langsung supaya lebih mudah dimengerti jadi saya sebagai calon pengantin bisa lebih paham tentang informasi yang disampaikan” (Wawancara 24 Desember 2025)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai program Tim Pendamping Keluarga (TPK) disampaikan secara langsung oleh kader TPK dengan cara datang ke rumah, sehingga calon pengantin dapat mengetahui program tersebut secara jelas. Dalam sosialisasi tersebut, kader TPK memberikan pendampingan terkait persiapan mental dan kesehatan sebelum menikah, menanyakan atau memastikan apakah calon pengantin sudah melakukan vaksin TT. Selain itu, kader TPK juga memastikan bahwa informasi yang diberikan benar-benar dipahami oleh calon pengantin. Hal ini dilakukan dengan cara menanyakan kembali apakah sudah paham atau belum, lalu jika masih ada yang kurang jelas, kader akan menjelaskan ulang bahkan memberikan contoh secara langsung agar informasi lebih mudah dimengerti. Dengan cara tersebut, calon pengantin menjadi lebih memahami informasi yang disampaikan dalam program TPK.



Gambar 1. Sosialisasi Program Tim Pendamping Keluarga melalui Kunjungan Rumah

Sumber : Dokumentasi Tim Pendamping Keluarga Desa Jambangan

Menurut George C Edward III Komunikasi Kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain transmisi (*trasmision*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*). Berdasarkan temuan penelitian pelaksanaan Program

Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Desa Jambangan menunjukkan bahwa aspek transmisi informasi dilakukan secara langsung kepada kelompok sasaran melalui kunjungan rumah. Tidak terdapat sosialisasi formal di tingkat desa, namun informasi mengenai program disampaikan oleh kader pada saat kunjungan pertama dengan memperkenalkan diri serta menjelaskan tujuan, manfaat, sasaran, dan jangka waktu pendampingan. Aspek kejelasan (*clarity*) tercermin dari penyampaian maksud dan tujuan program secara langsung kepada keluarga yang memiliki balita, ibu hamil, ibu menyusui, calon pengantin, dan remaja sehingga masyarakat memahami maksud dan bentuk kegiatan pendampingan. Sementara itu, aspek konsistensi (*consistency*) terlihat dari pola penyampaian yang sama oleh kader saat melakukan kunjungan, yaitu diawali dengan perkenalan dan penjelasan terkait program pendampingan. Dengan demikian, komunikasi kebijakan dalam pelaksanaan program TPK di Desa Jambangan berlangsung melalui pendekatan interpersonal yang memuat unsur transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi.

Berdasarkan perbandingan dengan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, indikator komunikasi dalam Program TPK di Desa Jambangan menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal pada aspek tertentu. Dalam teori, komunikasi mencakup tiga dimensi utama yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi. Pada aspek transmisi, penyampaian informasi program belum dilakukan secara formal melalui sosialisasi di tingkat desa, sehingga masyarakat umumnya baru mengetahui program saat kunjungan pertama kader ke rumah. Hal ini menunjukkan bahwa jalur komunikasi yang digunakan lebih bersifat langsung (interpersonal) dibandingkan melalui forum resmi. Kondisi ini dapat menjadi kelemahan karena tidak semua masyarakat memperoleh informasi secara merata sejak awal. Namun, pada aspek kejelasan, komunikasi yang dilakukan kader tergolong efektif. Kader tidak hanya memperkenalkan program, tetapi juga menjelaskan tujuan, manfaat, serta bentuk pendampingan secara rinci. Selain itu, kader memastikan pemahaman masyarakat dengan cara menanyakan kembali, mengulang penjelasan, bahkan memberikan contoh secara langsung apabila masih terdapat kebingungan. Hal ini membuat informasi lebih mudah dipahami oleh sasaran program. Selanjutnya, pada aspek konsistensi, komunikasi dilakukan secara berkelanjutan melalui kunjungan rutin dan pendampingan berkala. Interaksi yang terus dilakukan ini memperkuat hubungan antara kader dan masyarakat serta memastikan informasi tetap tersampaikan secara berkesinambungan. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan teori Edward III, komunikasi dalam program TPK di Desa Jambangan sudah berjalan cukup efektif terutama dari segi kejelasan dan konsistensi. Meskipun transmisi informasi belum dilakukan secara formal melalui sosialisasi desa, pendekatan interpersonal yang dilakukan kader mampu menjadi alternatif yang efektif dalam menyampaikan informasi dan memastikan program dapat dipahami serta diterima oleh masyarakat.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Aulia Rahma, dkk (2025) yang berjudul “*Implementasi Program TPK (Tim Pendamping Keluarga) Dalam Pendampingan Calon Pengantin dan Ibu Hamil di Desa Telaga Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara*” menunjukkan bahwa komunikasi yang dikemukakan oleh George C Edward III yaitu Program sosialisasi dan edukasi terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin dan ibu hamil mengenai pentingnya kesehatan reproduksi, pemenuhan gizi, serta upaya pencegahan stunting. Kegiatan ini dilaksanakan melalui berbagai metode, seperti kunjungan rumah, pertemuan kelompok, dan pendampingan personal. Pelibatan keluarga, kader posyandu, dan unsur masyarakat secara aktif turut memperkuat dukungan komunitas terhadap pencapaian tujuan program [2]. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alfi Makrifatul Azizah (2025) yang berjudul “*Peran Tim Pendamping Keluarga dalam Melakukan Komunikasi Interpersonal Guna Pencegahan Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas*” menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga hasilnya menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal yang efektif mencakup sikap terbuka, empati dan dialog berperan besar dalam membantu masyarakat memahami dan menerima informasi kesehatan, serta mendorong perubahan perilaku pencegahan stunting [9]. Serta Penelitian yang dilakukan oleh Lieskusumastuti, dkk (2022) yang berjudul “*Upaya Pencegahan Stunting melalui Metode Kunjungan Rumah*” menunjukkan bahwa pendampingan keluarga melalui metode kunjungan rumah berhasil memberikan edukasi, informasi, dan motivasi pada keluarga sasaran (termasuk ibu hamil dan balita) dengan penerimaan yang baik dari masyarakat. Dengan kunjungan langsung, keluarga merasa termotivasi untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku baik terkait pencegahan stunting [10].

B. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan publik. Sumber daya ini mencakup pegawai dengan keterampilan dan kemampuan yang memadai untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Selain pegawai, informasi, dan wewenang pembuat kebijakan, terdapat pula permasalahan fasilitas dalam lembaga yang dapat memengaruhi atau bahkan menghambat implementasi kebijakan [11]. Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pernyataan dari Ibu Iis Hariati selaku Kaur Perencanaan Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

“*Untuk mendukung implementasi program TPK dan ini paket data paket data karena ini laporannya via server yang menggunakan internet paket data jadi ada paket datanya itu 100.000 per orang tiap bulan, batras juga ada untuk setiap kali kunjungan itu 50.000 ribu ya kemudian ATK tadi ya kayak segala macam penggandaan cetak*”

fotocopy dan buku register itu dapat berapa gitu 50.000 ribu per tim ada 4 tim terus hambatannya itu laporan yang sering berubah-ubah kadang itu sekarang ini dibutuhkan laporan secara manual besok itu laporan secara link lah link-nya ini yang kita itu gampang-gampang sulit kadang jaringannya dari misalnya kita sudah melaporkan eh ternyata di sana enggak ke input kita melaporkan ulang manual jadi double gitu loh.” (Wawancara 25 September 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Perencanaan terkait implementasi program Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Desa Jambangan, diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan TPK telah mendapatkan dukungan sumber daya yang cukup memadai, terutama dalam bentuk dukungan finansial dan sarana operasional. Setiap anggota TPK memperoleh paket data sebesar Rp 100.000 per orang per bulan untuk menunjang kegiatan pelaporan yang dilakukan melalui server berbasis internet. Selain itu, terdapat pula insentif bantuan transportasi (bantras) sebesar Rp50.000 setiap kali melakukan kunjungan keluarga, serta dana alat tulis kantor (ATK) seperti penggandaan dokumen, fotokopi, dan buku register sebesar Rp50.000 per tim, di mana dalam satu desa terdapat empat tim TPK. Namun, meskipun dukungan sumber daya sudah disediakan, pelaksana di lapangan masih menghadapi beberapa hambatan, terutama terkait kendala teknis pada sistem pelaporan. Informan menyampaikan bahwa sistem pelaporan sering mengalami perubahan; terkadang pelaporan dilakukan secara manual, namun pada waktu lain harus melalui tautan (*link*) online. Kondisi ini menyebabkan proses pelaporan menjadi kurang efisien. Selain itu, sering kali terjadi gangguan jaringan internet yang mengakibatkan laporan yang sudah dikirim tidak terinput di server, sehingga anggota TPK harus tersebut menyebabkan terjadinya pekerjaan ganda (mengulang pelaporan secara manual. Situasi (*double report*) dan menambah beban kerja petugas.

Lalu, Ibu Khusnul Khotimah selaku anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK) Desa Jambangan.

“ Sarana Prasarana yang digunakan biasanya HP untuk meginput hasil kunjungan ke aplikasi Elsimil dan Fasilitas yang di dapat kader TPK ada pulsa Rp 100.000 perbulan dan honor Rp. 120.000 bulan serta Pelatihan pendampingan oleh PLKB dan BKKBN biasanya semua tim tpk ngumpul di baldes terus di hadir PLKB kecamatan ” (Wawancara 10 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Implementasi Program Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Desa Jambangan telah didukung oleh sarana prasarana, dukungan finansial, serta peningkatan kapasitas kader. Dalam pelaksanaannya, kader TPK menggunakan handphone (HP) sebagai alat utama untuk menginput hasil kunjungan ke dalam aplikasi Elsimil, sehingga proses pelaporan dan pendataan sasaran dilakukan secara digital dan terintegrasi. Selain itu, kader TPK memperoleh fasilitas berupa pulsa sebesar Rp100.000 per bulan dan honorarium sebesar Rp120.000 per bulan sebagai bentuk dukungan operasional dalam menjalankan tugas pendampingan kepada keluarga sasaran. Meskipun jumlahnya terbatas, fasilitas tersebut menunjukkan adanya dukungan sumber daya finansial untuk menunjang keberlangsungan kegiatan di lapangan. Di sisi lain, kader juga mendapatkan pelatihan pendampingan yang difasilitasi oleh PLKB dan BKKBN. Kegiatan pelatihan biasanya dilaksanakan di balai desa dengan menghadirkan PLKB kecamatan serta seluruh tim TPK. Hal ini menunjukkan adanya upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar kader memahami tugas, fungsi, serta teknis pelaksanaan pendampingan keluarga.

Berikut tabel pembagian tugas Program Tim Pendamping Keluarga Desa Jambangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jambangan tentang Pembentukan Tim Pendamping Keluarga tahun 2025.

Tabel 2. Pembagian Tugas Program Tim Pendamping Keluarga Desa Jambangan

Tim	Nama	Jabatan	Tupoksi
1	Lilik Hidayati	Bidan Desa	Bidan berperan sebagai penanggung jawab utama dalam koordinasi kegiatan pendampingan keluarga sekaligus sebagai tenaga yang memberikan layanan kesehatan.
	Tutik Juroidah	Kader PPKBD/Sub	a. Kader PPKBD di tingkat desa/kelurahan berfungsi sebagai Penggerak kegiatan serta fasilitator atau penghubung dalam pelayanan kepada keluarga.
	Binti Maisaroh	Kader PPKBD/Sub	
2	Iis Hariati	Kader PPKBD/Sub	b. Melakukan pencatatan dan pelaporan terkait data serta perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga maupun kelompok sasaran.
	Asrul Mufidah	Kader PPKBD/Sub	
	Khusnul Khotimah	Kader PPKBD/Sub	
3	Denok Tri Wahyuni	Kader PPKBD/Sub	c. Melaksanakan pendampingan kepada seluruh ibu hamil melalui pemantauan dan pemeriksaan kehamilan secara rutin,
	Dewi Hajar Hapsari	Kader PPKBD/Sub	
	Siti Munfa'atun	Kader PPKBD/Sub	
4	Luluk Indahyati	Kader PPKBD/Sub	

	Susi Rahayu Tjatur	Kader PPKBD/Sub	memberikan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait KB pasca persalinan, serta membantu proses rujukan apabila diperlukan.
	Katri Rustiyansih	Kader PPKBD/Sub	

Sumber : Surat Keputusan Kepala Desa Jambangan tentang Pembentukan Tim Pendamping Keluarga Tahun 2025

Tabel tersebut menggambarkan susunan Tim Pendamping Keluarga (TPK) Desa Jambangan yang terdiri dari 12 orang dan dibagi ke dalam 4 tim, dimana setiap tim beranggotakan 3 orang dengan komposisi bidan desa dan kader PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa). Jika dikaitkan dengan indikator sumber daya dalam teori George C. Edward III, tabel ini menunjukkan bahwa program TPK telah didukung oleh sumber daya manusia yang memadai baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Kehadiran bidan desa mencerminkan adanya tenaga profesional di bidang kesehatan, sementara kader PPKBD/Sub berperan dalam pendampingan sosial dan komunikasi kepada masyarakat. Selain itu, pembagian anggota ke dalam beberapa tim juga menunjukkan adanya distribusi tugas yang jelas, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif sesuai dengan wilayah atau sasaran masing-masing. Dengan demikian, tabel tersebut menegaskan bahwa aspek sumber daya, khususnya sumber daya manusia, telah terpenuhi dan menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan implementasi program TPK di Desa Jambangan.

Menurut George C Edward III dalam indikator sumber daya mencakup sumber daya finansial, fasilitas/teknologi, dan sumber daya manusia. Dari sisi finansial, setiap anggota TPK memperoleh paket data sebesar Rp100.000 per bulan untuk mendukung pelaporan berbasis internet, bantuan transportasi (bantras) sebesar Rp50.000 setiap kali kunjungan, dana ATK sebesar Rp50.000 per tim untuk kebutuhan penggandaan dokumen, fotokopi, dan buku register, serta honorarium sebesar Rp120.000 per bulan. Di Desa Jambangan terdapat empat tim TPK yang menerima dukungan tersebut. Dari sisi fasilitas dan teknologi, kader menggunakan handphone (HP) untuk menginput hasil kunjungan ke dalam aplikasi Elsimil yang terhubung melalui server internet. Pelaporan dilakukan secara daring, namun dalam pelaksanaannya terdapat perubahan mekanisme pelaporan yang terkadang dilakukan secara manual dan di waktu lain melalui tautan (*link*) online. Selain itu, terdapat kendala jaringan yang menyebabkan laporan yang telah dikirim tidak terinput sehingga dilakukan pelaporan ulang secara manual. Dari sisi sumber daya manusia, susunan Tim Pendamping Keluarga (TPK) Desa Jambangan menunjukkan bahwa sumber daya manusia telah memadai, baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Kehadiran bidan desa sebagai tenaga profesional dan kader PPKBD/Sub sebagai pendamping sosial, serta pembagian tim yang jelas, mendukung efektivitas pelaksanaan program dan kader TPK memperoleh pelatihan dan pendampingan yang difasilitasi oleh PLKB dan BKKBN. Kegiatan pelatihan dilaksanakan di balai desa dengan menghadirkan PLKB kecamatan serta seluruh tim TPK. Pelatihan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan teknis pendampingan keluarga dalam program TPK di Desa Jambangan.

Berdasarkan perbandingan antara hasil penelitian dengan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III pada indikator sumber daya, dapat dijelaskan bahwa implementasi Program Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Desa Jambangan pada dasarnya telah didukung oleh ketersediaan sumber daya yang cukup memadai. Hal ini terlihat dari adanya dukungan finansial berupa paket data, bantuan transportasi, honorarium, serta dana operasional seperti ATK. Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia juga tergolong memadai dengan adanya pembagian tim TPK serta dukungan pelatihan dari PLKB dan BKKBN. Sarana dan prasarana yang digunakan, seperti handphone dan aplikasi Elsimil, turut mendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan dan pelaporan secara digital. Namun demikian, jika ditinjau lebih lanjut, implementasi tersebut belum sepenuhnya selaras dengan konsep sumber daya dalam teori Edward III, khususnya pada aspek kualitas dan pemanfaatan sumber daya. Dalam praktiknya, masih ditemukan kendala pada sistem pelaporan yang sering berubah antara metode manual dan online, serta gangguan jaringan internet yang menyebabkan laporan tidak terinput dengan baik. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya pelaporan ulang secara manual atau *double report* yang berdampak pada meningkatnya beban kerja pelaksana di lapangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara kuantitas sumber daya dalam implementasi program TPK telah terpenuhi, namun secara kualitas dan efektivitas pemanfaatannya masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih optimal sesuai dengan yang dikemukakan dalam teori implementasi oleh Edward III.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Humaira,dkk (2024) yang berjudul "Implementasi Program Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Desa Sinjar Bulan Kecamatan Gumay Ulu Lahat Sumatera Selatan" menunjukkan bahwa pelaksanaan program TPK telah berjalan cukup baik berkat dukungan sumber daya yang mencakup sumber daya manusia, dana operasional, aplikasi pelaporan, serta pelatihan kader. Setiap anggota TPK memperoleh insentif pulsa sebesar Rp100.000 dan dana operasional Rp110.000 per bulan untuk mendukung kegiatan pendampingan dan pelaporan melalui aplikasi elsimil. Namun, penelitian juga menemukan kendala berupa *error* sistem dan gangguan jaringan internet yang menyebabkan laporan tidak masuk ke server, sehingga kader harus mengulang pelaporan secara manual. Selain itu, keterbatasan sarana prasarana seperti kurangnya laptop, printer, dan kualitas jaringan yang buruk turut menghambat efektivitas pelaporan. Meskipun demikian, dukungan finansial dan

sumber daya manusia dianggap sudah cukup, hanya saja infrastruktur pelaporan dan jaringan internet perlu diperkuat agar pelaksanaan program lebih optimal[6].

C. Disposisi

Sikap para pelaksana dapat berdampak signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan atau program. Pihak yang mendukung kebijakan atau inisiatif akan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan. Selain memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, para pelaksana harus memiliki motivasi dan semangat yang tinggi untuk melaksanakan kebijakan atau inisiatif tersebut [12]. Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pernyataan dari Ibu Iis Hariati selaku Kaur Perencanaan Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

“Antusias, welcome, pada saat pendampingan sopan, karena memang ibu-ibu terbiasa kan menghadapi itu, lebih luwes terus tanggung jawab pokoknya aman-aman aja di sini cuma memang ada satu orang kemarin itu yang keterbatasan karena habis sakit itu jadi menghambat Otomatis dia tetangguh jawabnya sarannya itu dilimpahkan ke teman yang lain nambah itu kendalanya.” (Wawancara 25 September 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa para kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Desa Jambangan menunjukkan sikap dan disposisi yang positif dalam melaksanakan program pendampingan keluarga. Informan menyebutkan bahwa para kader bersikap antusias, ramah, sopan, dan luwes dalam berinteraksi dengan masyarakat. Hal ini didukung oleh latar belakang mereka sebagai ibu rumah tangga yang terbiasa menghadapi berbagai situasi sosial di lingkungan desa. Sikap tersebut menciptakan suasana yang nyaman bagi keluarga sasaran saat menerima kunjungan pendampingan. Selain itu, kader TPK juga dikenal bertanggung jawab dan bekerja sama dengan baik. Meskipun terdapat salah satu anggota yang mengalami kendala kesehatan, pelaksanaan kegiatan tetap berjalan karena tugas dan sasaran pendampingan dialihkan kepada kader lain.

Lalu, Ibu Khusnul Khotimah selaku anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK) Desa Jambangan.

“Jadi sikap kita ketika melakukan pendamping setiap anggota bertanggung jawab dalam melaksanakan pendampingan dan selalu berkordinasi dengan Tim lain serta PLKB ” (Wawancara 10 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pendampingan, setiap anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK) memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing sesuai dengan peran yang telah ditetapkan. Tanggung jawab tersebut mencakup pelaksanaan kunjungan, pemberian edukasi, pemantauan kondisi sasaran, serta pelaporan hasil kegiatan. Selain itu, pernyataan tersebut juga menunjukkan adanya sikap kerja sama dan koordinasi yang baik antaranggota tim maupun dengan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Koordinasi ini penting untuk menyamakan informasi, membahas kendala di lapangan, serta memastikan bahwa pendampingan berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan program.

Kemudian pernyataan dari Saudari Yuhan Adelina (Calon Pengantin) selaku masyarakat penerima program Tim Pendamping Keluarga Desa Jambangan.

“ Sikap kader TPK waktu pendampingan cukup baik dan ramah mereka datang menjelaskan dengan sabar sebagai calon pengantin saya juga merasa nyaman karena mereka menyampaikan informasi dengan baik dan mereka tetap melakukan pendampingan, memberi arahan, dan sesekali menanyakan perkembangan atau kesiapan saya sebelum menikah jadi dari situ terlihat kalau mereka memang menjalankan program ini dengan tanggung jawab ” (Wawancara 24 Desember 2025).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) menunjukkan sikap yang positif dan memiliki komitmen yang baik dalam melaksanakan pendampingan kepada calon pengantin. Sikap ramah, sabar, dan cara penyampaian informasi yang jelas membuat calon pengantin merasa nyaman saat menerima pendampingan. Selain itu, TPK juga tetap aktif melakukan pendampingan dengan memberikan arahan serta menanyakan perkembangan atau kesiapan sebelum menikah. Hal ini menunjukkan bahwa TPK menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam mendukung keberhasilan program.

Berikut gambar dokumentasi Program Tim Pendamping Keluarga Wujud Tanggung Jawab Kader Tim Pendamping Keluarga Desa Jambangan.



Gambar 2. Kunjungan ke Rumah Balita Wujud Tanggung Jawab Tim Pendamping Keluarga Desa Jambangan

Sumber : Dokumentasi Tim Pendamping Keluarga Desa Jambangan

Pelaksanaan Program Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Desa Jambangan menunjukkan adanya sikap dan komitmen pelaksana dalam mendukung implementasi kebijakan. Indikator disposisi dalam teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III menekankan pada sikap, komitmen, tanggung jawab, dan kesediaan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa para kader TPK bersikap antusias, ramah, sopan, dan luwes dalam berinteraksi dengan masyarakat saat melakukan pendampingan. Kader juga tetap melaksanakan kegiatan meskipun terdapat anggota yang mengalami kendala kesehatan, dengan cara mengalihkan tugas dan sasaran pendampingan kepada anggota lain. Selain itu, setiap anggota melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan serta melakukan koordinasi dengan anggota tim lain dan PLKB dalam pelaksanaan pendampingan. Berdasarkan indikator disposisi, pelaksanaan Program TPK di Desa Jambangan ditunjukkan melalui sikap pelaksana yang bertanggung jawab, adanya komitmen dalam menjalankan tugas, serta koordinasi antaranggota tim dalam mendukung pelaksanaan program.

Berdasarkan perbandingan antara teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III dengan hasil penelitian di lapangan, dapat dideskripsikan bahwa indikator disposisi dalam pelaksanaan Program Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Desa Jambangan telah terpenuhi dengan baik. Disposisi yang dimaksud mencakup sikap, komitmen, serta tanggung jawab para pelaksana dalam menjalankan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para kader TPK memiliki sikap yang positif, ditandai dengan antusiasme, keramahan, kesopanan, serta kemampuan berinteraksi secara luwes dengan masyarakat. Sikap ini mencerminkan adanya penerimaan yang baik terhadap program yang dijalankan, sehingga mampu menciptakan suasana pendampingan yang nyaman bagi keluarga sasaran. Selain itu, kader juga menunjukkan komitmen yang tinggi melalui pelaksanaan tugas secara konsisten, mulai dari kunjungan pendampingan, pemberian edukasi, hingga pelaporan kegiatan. Dari aspek tanggung jawab, setiap anggota TPK melaksanakan perannya sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan serta menjalin koordinasi yang baik antaranggota tim maupun dengan PLKB. Kerja sama yang terjalin terlihat ketika terdapat kendala pada salah satu anggota, di mana tugas pendampingan tetap dapat dilaksanakan melalui pengalihan tanggung jawab kepada anggota lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya bergantung pada individu, tetapi didukung oleh solidaritas tim yang kuat. Dengan demikian, disposisi para pelaksana dalam program TPK di Desa Jambangan dapat dikatakan telah sesuai dengan indikator dalam teori Edward III. Sikap yang positif, komitmen yang tinggi, serta tanggung jawab yang baik menjadi faktor pendukung utama dalam keberhasilan implementasi program pendampingan keluarga di desa tersebut.

Temuan tersebut sejalan penelitian yang dilakukan oleh Magfira dan Niluh Desy Purnamasari (2021) yang berjudul “Peran Kader Dalam Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu Di Desa Makmur Kecamatan Palolo” menunjukkan bahwa sebagian besar kader melaksanakan perannya dengan baik karena memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap masyarakat. Kader yang berkomitmen dan memiliki sikap positif mampu bekerja sama dengan tim lainnya serta tetap menjalankan tugas meskipun menghadapi keterbatasan di lapangan. Hasil ini relevan dengan kondisi di Desa Jambangan, di mana kader tetap menjaga keberlangsungan program meskipun salah satu anggotanya mengalami kendala kesehatan [17].

D. Struktur Birokrasi

Menurut Edwards III (dalam Agustino, 2014:141), struktur organisasi terdiri dari pengembangan prosedur operasional standar (SOP) yang lebih adaptif, yang dapat meningkatkan kinerja organisasi atau administrasi. SOP

adalah prosedur atau aktivitas rutin yang direncanakan, yang memungkinkan pelaksanaannya, seperti karyawan, pegawai negeri, dan staf administrasi, untuk mendistribusikan tanggung jawab atas berbagai aktivitas, tugas, atau program di antara unit kerja yang berbeda, masing-masing sesuai dengan bidang keahliannya. SOP juga memungkinkan mereka untuk melaksanakan tugas harian mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan[13]. Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pernyataan dari Ibu Iis Hariati selaku Kaur Perencanaan Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

“Jadi, tim TPK itu dibagi sesuai wilayah yang terdiri dari bidan, pkk dan kader kb satu tim itu kan tiga orang Tim satu di Dusun Pesantren, Tim dua di Dusun Sidomulyo, Tim tiga RW 6 Perum Citra Sentosa Mandiri (CSM), dan Tim empat itu gabungan RW 7 dan 8 Perumtas 4 sama Perumtas Regency satu orang itu bertanggung jawab melaporkan setidaknya maksimal 12 sasaran satu orang berarti satu tim itu setidaknya 36 untuk wilayah tersebut tapi kalau memang seandainya mentok nggak ada 36 nggak apa-apa sasarnya misalnya dalam satu wilayah, dusun pesantren masih andaikan 30, ya dibagi rata jadi perorang 10 sasaran, masing-masing orang dibagi rata, sesuai wilayah dampungannya, gitu jadi, tidak ada yang seperti ketua” (Wawancara 25 September 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pelaksanaan Program Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Desa Jambangan dibagi berdasarkan wilayah kerja agar kegiatan pendampingan dapat berjalan lebih efektif. Terdiri dari bidan, anggota PKK, dan kader KB dan setiap tim terdiri dari tiga orang. Pembagian wilayah dilakukan secara merata dengan yaitu Tim satu bertugas di Dusun Pesantren, Tim dua di Dusun Sidomulyo, Tim tiga di RW 6 Perum Citra Sentosa Mandiri (CSM), dan Tim empat di wilayah gabungan RW 7 dan 8 Perumtas 4 serta Perumtas Regency. Masing-masing anggota tim memiliki tanggung jawab untuk mendampingi maksimal 12 sasaran keluarga, sehingga satu tim menangani sekitar 36 sasaran. Apabila jumlah sasaran di suatu wilayah tidak mencapai 36, maka jumlah sasaran yang ada dibagi secara merata kepada masing-masing anggota tim. Sebagai contoh, apabila terdapat 30 sasaran dalam satu wilayah, maka setiap anggota bertanggung jawab atas 10 sasaran sesuai dengan wilayah dampungannya masing-masing. Dalam pelaksanaannya, tidak terdapat struktur ketua dalam tim, sehingga ketiga anggota memiliki kedudukan yang setara.

Lalu, Ibu Khusnul Khotimah selaku anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK) Desa Jambangan.

“Untuk pembagian tugasnya jumlah tim pendamping keluarga di sini ada 12 yang setiap tim terdiri dari 3 orang yang membawa paling sedikit 6 RT sesuai wilayah dampingan masing - masing di desa jambangan ada 4 tim pendamping tpk” (Wawancara 10 Oktober 2025).

Berdasarkan wawancara tersebut, jumlah Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Desa Jambangan sebanyak 12 orang. Seluruh anggota tersebut dibagi ke dalam 4 tim, di mana setiap tim terdiri dari 3 orang. Masing-masing tim bertanggung jawab mendampingi paling sedikit 6 RT sesuai dengan wilayah dampingan yang telah ditentukan di Desa Jambangan. Berikut Gambar Tahapan Kegiatan Program Tim Pendamping Keluarga Desa Jambangan.



Gambar 3. Tahapan Kegiatan Program Tim Pendamping Keluarga Desa Jambangan

Sumber : Diolah Penulis

Gambar tersebut menunjukkan Tahapan Kegiatan atau SOP Program Tim Pendamping Keluarga (TPK) Desa Jambangan dimulai dari tahap persiapan melalui pembentukan tim dan pendataan sasaran, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi dan verifikasi keluarga sasaran. Setelah itu dilakukan kunjungan awal sebagai bentuk sosialisasi secara langsung, diikuti dengan pendampingan berkala melalui kunjungan rutin untuk memberikan edukasi dan monitoring kondisi sasaran. Setiap kegiatan dicatat dan dilaporkan melalui sistem yang tersedia yaitu melalui aplikasi Elsimil, kemudian dilakukan evaluasi untuk melihat hasil dan kendala yang dihadapi. Selanjutnya dilakukan tindak lanjut berupa rujukan kasus dan koordinasi dengan pihak terkait, serta penguatan melalui rapat koordinasi agar program berjalan efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, apabila dikaitkan dengan indikator struktur birokrasi dalam teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, pelaksanaan Program Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Desa Jambangan menunjukkan adanya pembagian struktur kerja yang tersusun berdasarkan wilayah dan jumlah personel dan Tahapan kegiatan atau SOP Program Tim Pendamping Keluarga. Struktur tersebut terdiri atas 12 anggota yang terbagi ke dalam 4 tim, dengan masing-masing tim beranggotakan 3 orang yang terdiri dari bidan, anggota PKK, dan kader KB. Setiap tim memiliki wilayah dampingan yang berbeda, yaitu Dusun Pesantren, Dusun Sidomulyo, RW 6 Perum Citra Sentosa Mandiri (CSM), serta gabungan RW 7 dan 8 Perumtas 4 dan Perumtas Regency. Masing-masing tim mendampingi paling sedikit 6 RT sesuai wilayah yang telah ditentukan. Dalam pembagian sasaran, setiap anggota bertanggung jawab atas maksimal 12 keluarga, sehingga satu tim dapat menangani sekitar 36 sasaran. Apabila jumlah sasaran tidak mencapai 36, maka dilakukan pembagian secara merata kepada masing-masing anggota. Dalam struktur tim tidak terdapat posisi ketua, sehingga ketiga anggota memiliki kedudukan yang setara dalam pelaksanaan tugas. Tahapan kegiatan atau SOP Program dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur, dimulai dari tahap persiapan (pembentukan tim dan pendataan sasaran), dilanjutkan dengan identifikasi serta verifikasi keluarga sasaran. Selanjutnya dilakukan kunjungan awal sebagai sosialisasi, kemudian pendampingan berkala melalui kunjungan rutin untuk edukasi dan monitoring. Seluruh kegiatan dicatat dalam aplikasi Elsimil, diikuti evaluasi, serta tindak lanjut berupa rujukan dan koordinasi lintas pihak. Penguatan program dilakukan melalui rapat koordinasi agar implementasi berjalan efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan perbandingan antara teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III dengan hasil penelitian di lapangan, dapat dideskripsikan bahwa indikator struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Desa Jambangan telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam teori. Dalam teori Edward III, struktur birokrasi mencakup dua aspek utama, yaitu pembagian tugas (fragmentasi) dan kejelasan prosedur kerja (SOP). Hal ini terlihat dari adanya pembagian tugas (fragmentasi) yang jelas melalui pembentukan tim berdasarkan wilayah kerja, di mana setiap tim terdiri dari tiga orang (bidan, PKK, dan kader KB) dan memiliki tanggung jawab terhadap sejumlah sasaran keluarga. Pembagian ini juga bersifat fleksibel karena disesuaikan dengan kondisi jumlah sasaran di masing-masing wilayah. Selain itu, dari aspek prosedur kerja (SOP), pelaksanaan program telah memiliki tahapan yang terstruktur, mulai dari persiapan, pendataan, verifikasi, kunjungan awal, pendampingan rutin, hingga pelaporan melalui aplikasi Elsimil, serta dilengkapi dengan evaluasi dan tindak lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah mengikuti alur kerja yang jelas. Meskipun dalam struktur tim tidak terdapat ketua atau garis komando formal, pelaksanaan tetap berjalan efektif karena didukung oleh koordinasi dan kerja sama antar anggota tim. Dengan demikian, struktur birokrasi dalam program TPK di Desa Jambangan telah sesuai dengan indikator teori Edward III dan mampu mendukung kelancaran implementasi program.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang berjudul *Evaluasi Program Tim Pendamping Keluarga Di Desa Lokus Stunting Kabupaten Konawe Selatan* yang dilakukan oleh Martina dan Devi Savitri Effendy (2025) menunjukkan bahwa Tim Pendamping Keluarga (TPK) merupakan program strategis nasional dalam percepatan penurunan stunting yang melibatkan bidan, kader PKK, dan kader KB dan berfokus pada pendampingan kelompok sasaran dengan pembagian tugas kepada tiga unsur tersebut. Ini mendukung struktur tim yang terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB serta memberi kerangka tugas kerja sesuai keahlian masing-masing anggota tim [14]. Serta Penelitian sebelumnya yang berjudul *Peningkatan Kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam Melakukan Surveilans pada Program Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sragen* yang dilakukan oleh Indri Mulyasari, dkk (2024) menunjukkan bahwa salah satu tugas TPK adalah mengumpulkan data keluarga dan melakukan surveilans gizi, yang menunjukkan adanya pembagian tugas masing-masing anggota dalam tim untuk bekerja dengan wilayah/keluarga tertentu. Hal ini mendukung tentang pembagian wilayah pendampingan [15].

VII. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Program Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Desa Jambangan secara umum telah berjalan cukup baik dan mampu mendukung terwujudnya desa mandiri, khususnya dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas hidup keluarga. Dari aspek komunikasi, penyampaian informasi dilakukan secara langsung melalui kunjungan rumah sehingga masyarakat dapat memahami tujuan, manfaat, dan proses pendampingan dengan jelas, meskipun belum didukung oleh sosialisasi formal di tingkat desa. Dari Aspek

Sumber Daya, program ini telah didukung oleh sumber daya manusia, finansial, serta sarana prasarana yang cukup memadai. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala teknis, terutama pada sistem pelaporan digital dan jaringan internet yang belum stabil, sehingga menyebabkan ketidakefisienan dalam proses pelaporan. Pada Aspek Disposisi, para pelaksana program menunjukkan sikap yang sangat baik, seperti ramah, responsif, bertanggung jawab, serta memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan tugas. Hal ini membuat masyarakat merasa nyaman dan terbantu selama proses pendampingan berlangsung. Sementara itu, dari Aspek Struktur Birokrasi, pelaksanaan program telah didukung oleh pembagian tugas yang jelas berdasarkan wilayah serta adanya tahapan kegiatan atau SOP yang terstruktur, sehingga kegiatan pendampingan dapat berjalan secara sistematis dan terarah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program TPK di Desa Jambangan telah berjalan cukup efektif, namun masih memerlukan perbaikan terutama pada aspek teknis dan pemanfaatan teknologi agar pelaksanaan program dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian yang berjudul “Implementasi Program Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam Mewujudkan Desa Mandiri Studi Kasus: Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo” dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Desa Jambangan yang telah memberikan izin dan dukungan selama proses penelitian berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK) Desa Jambangan yang telah bersedia memberikan informasi, data, serta pengalaman selama pelaksanaan program. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh informan dan keluarga sasaran program yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai serta memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian selanjutnya. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan Program Tim Pendamping Keluarga di tingkat desa.

REFERENSI

- [1] M. Suherman and N. Rohaeni, “Efektivitas Program Desa Mandiri dalam Mencapai Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung),” *Remik Ris. dan E-Jurnal Manaj. Inform. Komput.*, vol. 7, no. 3, pp. 1534–1542, 2023, [Online]. Available: <http://doi.org/10.33395/remik.v7i3.12846>
- [2] A. Rahman, Munawarah, and Fakhri, “Implementasi Program TPK (Tim Pendamping Keluarga) dalam Pendampingan Calon Pengantin dan Ibu Hamil di Desa Telaga Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara,” *J. Kebijakan. Publik*, vol. 2, no. 2, pp. 735–747, 2025.
- [3] T. K. D. Negeri, T. K. Kesehatan, T. K. Desa, T. BKKBN, T. T. PKK, and T. I. (Ikatan B. Indonesia), *Panduan Pelaksanaan Pendampingan Keluarga dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Desa/Kelurahan*. Jakarta: Direktorat Bina Penggerak Lini Lapangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2021. [Online]. Available: https://daikeren.id/uploads/daikeren-buku_panduan_tim_pendamping_final.pdf
- [4] Admindinsosp3akb, “Peningkatan Kapasitas Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam Penanganan Keluarga Berisiko Stunting,” Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten. [Online]. Available: <https://dissosp3appkb.klaten.go.id/peningkatan-kapasitas-kader-tim-pendamping-keluarga-tpk-dalam-penanganan-keluarga-berisiko-stunting>
- [5] Y. C. Dewi and I. F. Agustina, “Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kabupaten Sidoarjo,” *JKMP (Jurnal Kebijakan. dan Manaj. Publik)*, vol. 6, no. 2, pp. 129–135, 2018, doi: 10.21070/jkmp.v6i2.3007.
- [6] Rezka Zahra Humaira, F. Kartini, and L. Rosidah, “Implementasi Program Tim Pendamping Keluarga (TPK) Di Desa Sinjar Bulan Kecamatan Gumay Ulu Lahat Sumatera Selatan,” vol. 15, no. 1, pp. 79–96, 2024, doi: 10.1142/9789813226913_0011.
- [7] U. G. Kaendung Evander, Pangemanan v, “Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado,” *dalam J. Gov. Jur. Ilmu Pemerintah. FISPOL Unsrat*, vol. 1, no. 2, pp. 1–11, 2021.
- [8] S. Dinarwati1 and L. Natika, “Implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berbasis online pada DPMPSTP Kabupaten Subang,” *J. Univ. Subang*, vol. 6, no. 2, pp. 89–102, 2024.
- [9] A. M. Azizah, “Peran Tim Pendamping Keluarga dalam Melakukan Komunikasi Interpersonal Guna

- Pencegahan Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Wonokusumo,” *J. Kesehat. Tambusai*, vol. 6, no. 1, pp. 2164–2177, 2025, doi: 10.31004/jkt.v6i1.42304.
- [10] A. D. Lieskusumastuti, R. Jannah, and R. A. N. Nurgianti, “Upaya Pencegahan Stunting melalui Metode Kunjungan Rumah,” *J. Peduli Masy.*, vol. 4, no. Juni, pp. 283–292, 2022.
- [11] M. Indriyanti, M. Azkia, S. Eko Ginanjar, R. Santa, and T. Maryulina, “Inovasi Pencegahan Stunting Dalam Menggunakan Aplikasi Elsimil,” *J. Adm. Publik dan Bisnis*, vol. 6, no. 1, pp. 137–142, 2024, doi: 10.36917/japabis.v6i1.142.
- [12] N. M. Nasution and F. P. Gurning, “Implementasi Program Pendampingan Keluarga Resiko Stunting di Kota Medan,” vol. 5, no. September, pp. 8966–8974, 2024.
- [13] Nursalim, “Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Cikatomas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017,” *Din. J. Ilm. Ilmu Adm. Negara*, vol. 10, no. 3, pp. 117–126, 2017, [Online]. Available: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/viewFile/1671/1349>
- [14] M. Martina and D. S. Effendy, “Evaluasi Program Tim Pendamping Keluarga Di Desa Lokus Stunting Kabupaten Konawe Selatan,” *JUKEJ J. Kesehat. Jompa*, vol. 4, no. 2, pp. 824–830, 2025, doi: 10.57218/jkj.vol4.iss2.1921.
- [15] I. Mulyasari, Puji Afiatna, Moneca Diah Listiyaningsih, and Anisa Puspitasari, “Peningkatan Kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam Melakukan Surveilans pada Program Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sragen,” *Indones. J. Community Empower.*, vol. 6, no. 1, pp. 112–117, 2024, doi: 10.35473/ijce.v6i1.3189.
- [16] A. A. N. Cahyo, “Implementasi Program Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam Upaya Penurunan Stunting di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo,” Universitas Sebelas Maret Fakultas Sekolah Vokasi, Surakarta, 2025.
- [17] Magfira, & Purnamasari, N. D. (2021). Peran Kader Dalam Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu Di Desa Makmur Kecamatan Palolo. *Jurnal Ilmiah Kesmas IJ (Indonesia Jaya)*, 36-42.
- [18] Tim Pendamping Keluarga (TPK): penopang utama peningkatan kesejahteraan keluarga.(n.d.). <https://wanojacalakan.com/jankiesmilegmail-com/tim-pendamping-keluarga-tpk-penopang-utama%20peningkatan-kesejahteraan-keluarga>

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.